

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan nasional dalam sektor ketenagakerjaan ini dimaksudkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini selain sumber daya alam, faktor sumber daya manusia juga mempunyai andil yang penting dalam proses perkembangan dan kemajuan negara, salah satunya adalah tenaga kerja.¹ Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sehingga dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif bersama pengusaha dalam upaya menuju perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa dengan jalan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja.

Jaminan sosial yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atau buruh adalah merupakan kewajiban yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung keluarganya. Oleh karenanya, kesejahteraan yang dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh

¹ Hadi Setia Tunggal. 2014. *Seluk Beluk Ketenagakerjaan*. Jakarta: Harvarindo. Hal. 7.

penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua. Resiko-resiko sosial tersebut apabila tidak ada yang menangani, menjamin, melindungi para pekerja dari resiko-resiko tersebut pasti pekerja akan kesulitan untuk mendapatkan biaya perawatan dan pengobatannya, agar para pekerja bisa merasa lebih aman dalam melaksanakan pekerjaannya, sudah sepantasnya mereka mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.² BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

BPJS sendiri lebih bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dengan prinsip:³ kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-

²Kemenkes RI, *Buku Pegangan Sosialisasi JKN*, <http://www.depkes.go.id/resources/download/jkn/buku-pegangan-sosialisasi-jkn.pdf>. Hal. 40 di akses tanggal 29 Maret 2016 pukul 19.00 WIB.

³Lihat pasal 4 Undang-Undang BPJS.

besar kepentingan Peserta. Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan sehingga diperlukan suatu aturan hukum pidana khusus di dalam Undang-Undang BPJS tersebut.

Pengaturan pidana di dalam UU BPJS sendiri telah diatur secara khusus dan tersendiri yaitu yang terdapat di dalam pasal 54 yang berbunyi *“Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.⁴ Selain pengaturan pidana yang terdapat di dalam Pasal 54 juga terdapat aturan pidana yang terdapat di dalam Pasal 55 yang berbunyi *“Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau*

⁴ Pasal 52 UU BPJS:

g. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;
 h. menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;
 i. melakukan subsidi silang antarprogram;
 j. menempatkan investasi aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada Peraturan Pemerintah;
 k. menanamkan investasi kecuali surat berharga tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial;
 l. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; dan/atau
 m. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak catatan pembukuan BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial.

pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁵ Pada prinsipnya pengaturan sanksi pidana tersebut terbagi menjadi 2 yaitu terhadap pejabat BPJS dan terhadap pengusaha yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan karyawan mereka ke dalam BPJS agar masyarakat merasa bahwa jaminan sosial mereka telah terpenuhi.

Ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang BPJS merupakan aturan hukum pidana khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP harus terintegrasi dalam (konsisten dengan) aturan umum (*general rules*).⁶ Namun, dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP tersebut dapat membuat aturan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan aturan yang diatur di dalam Buku 1 KUHP dan terdapat dua jenis sanksi pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang BPJS dimana sanksi pidana yang pertama adalah ancaman sanksi bagi para pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja mereka ke dalam BPJS sedangkan sanksi yang kedua lebih kepada instansi yang melakukan pelayanan BPJS itu sendiri, sanksi pidana merupakan sanksi terakhir yang dijatuhkan atau dapat dikatakan merupakan sanksi yang paling berat

⁵Pasal 19 UU BPJS :

- (1) Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dan Pekerjaannya dan menyetorkan kepada BPJS
- (2) Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS

⁶L .H.C. Hullsman dalam Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 23.

setelah sanksi administratif sehingga sanksi pidana dibutuhkan di dalam Undang-Undang BPJS sebagai *lex specialist* atau aturan hukum khusus.

Sebagai contoh, Kota Surakarta sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah dalam menjalankan roda perekonomiannya merupakan daerah yang lebih mengedepankan sektor jasa dan pelayanan ketimbang sektor industri. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data statistik tahun 2015 bahwa persentase jenis usaha yang tumbuh di Kota Surakarta dari 763 jenis usaha yang ada, 75 % didominasi oleh sektor jasa perdagangan, perbankan/*financial*, dan jasa perhotelan serta jasa lainnya dengan total jumlah tenaga kerja 5.452 orang. Sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dijelaskan bahwa setiap pemberi kerja atau perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan, namun berdasarkan data awal tersebut, dari 247 perusahaan dan 5.452 jumlah tenaga kerja yang ada di Kota Surakarta, ditemukan bahwa baru sebanyak 185 Perusahaan dan 3000 tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan terhitung tanggal 5 Mei 2015.⁷

Permasalahan lainnya disamping masih sedikitnya jumlah peserta jaminan sosial tenaga kerja untuk tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja (pekerja formal), terdapat pula kurang lebih 10.000 orang pekerja sektor informal atau tenaga kerja di luar hubungan kerja yang belum menjadi peserta jaminan sosial

⁷ Randu Kiningsih. 2012. *Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja Oleh PT Jamsostek pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Malioboro Yogyakarta*. Surakarta: UNS. Hal. 75.

ketenagakerjaan, padahal dalam Pasal 14 Undang-Undang BPJS disebutkan bahwa *“Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”*.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **“Penegakan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih mendalam, terarah dan tepat mengenai sasaran karena itu untuk memudahkan pencapaian tujuan dalam pembahasannya, maka dalam penyusunan skripsi ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS?
2. Bagaimanakah penegakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta?
3. Apa hambatan-hambatan penegakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta?

⁸Data Laporan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta Tahun 2015.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Tujuan objektif, mendeskripsikan kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, penegakan sanksi pidana dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta serta hambatan-hambatan penegakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta.
- b. Tujuan subjektif, menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang penulis peroleh selama menempuh kuliah dalam mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, untuk mengembangkan daya penalaran dan daya pikir penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis. Selain itu juga untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Manfaat

- a. Manfaat teoritis, mengembangkan pengetahuan dibidang hukum pidana, memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu hukum yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana yang disandingkan dengan hukum administrasi negara, khususnya terkait kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang BPJS.
- b. Manfaat praktis, mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, khususnya dalam menganalisis tentang kebijakan pidana dalam Undang-Undang BPJS dan implementasinya di wilayah Kota Surakarta.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang BPJS para penegak hukum harus memperhatikan dua kepentingan hukum secara berimbang, yaitu kepentingan perorangan (hak seseorang) dengan kepentingan masyarakat dalam suatu proses beracara pidana.

Prevensi special dari pidana adalah pencegahan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti, pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat sedangkan *prevensi general* dimaksudkan pengaruh pidana pada masyarakat pada umumnya, artinya

pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana menurut Johannes Andenaes ada tiga bentuk pengaruh *prevensi general* didalamnya yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.⁹

Ide keseimbangan tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arief, merupakan ide keseimbangan monodualistik yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu, antara perlindungan atau kepentingan pelaku (ide individualisasi pidana) dan korban, antara faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin), ide “*daad-dader strafrecht*”; antara kriteria “formal” dan “material”; antara “kepastian hukum”, “kelenturan/elastisitas/fleksibilitas”, dan “keadilan”; antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.¹⁰

Penulis akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief untuk menjawab tentang rumusan masalah yang pertama dimana di dalam teori yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief Kebijakan hukum merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan (integraf) dari sebuah kebijakan sosial (*social policy*), atau dengan kata lain, kebijakan sosial mencakup di dalamnya kebijakan hukum, yang selengkapnya dikatakan kebijakan penegakan hukum

⁹Muladi dan Badar Nawawi Arief. 1984. *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal. 15-16.

¹⁰*Ibid.*

(*law enforcement policy*), jadi dengan demikian, kebijakan perundang-undangan (*legislative policy*) dan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial.¹¹

Dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang integral, dalam arti:¹²

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dari politik sosial;
- b. Ada keterpaduan (integralitas) anatara penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal tentu saja dilakukan dengan serangkaian kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan demikian usaha dan kebijakan untuk membuat hukum pidana yang baik dan berdayaguna atau politik hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*).

Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua maka penulis akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sartjipto Raharjo untuk menjawab tentang rumusan masalah yang kedua dimana didalam teori yang disampaikan oleh Sartjipto Raharjo penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum dalam hal ini tidak lain adalah

¹¹ G.P Hoefnagels. 1978. *The Other Side of Criminology*. Holland,Deventer-Khower hal 57 lihat dalam buku Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni 1998. Hal. 11.

¹²Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*.Bandung: Sinar Baru. Hal.20.

pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut.¹³

Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung 3 unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu :¹⁴

1. Kepastian hukum (*rechtsicherheit*),
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*),
3. Keadilan (*gerechtigkeith*).

Rumusan masalah yang ketiga maka penulis akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto untuk menjawab tentang rumusan masalah yang ketiga dimana didalam teori yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto bahwa hambatan-hambatan hukum yang terjadi didalam penegakan hukum adalah karena adanya 5 faktor yang melatar belakangnya diantaranya.¹⁵ Faktor hukumnya sendiri atau peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat, faktor kebudayaan sebernarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

¹³ Sartjipto Raharjo.1993. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Hal. 136.

¹⁴ *Ibid*, Hal. 30.

¹⁵ Soerjono Soekanto. 1986. *Teori Efektivitas Hukum*. Jakarta: Gramedia. Hal. 76.

E. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode Pendekatan Yuridis Empiris,¹⁶ dimana kajian dimulai dari kajian yuridis yang mengatur kebijakan hukum pidana dalam UU BPJS dan penegakan hukumnya di wilayah Kota Surakarta beserta hambatan-hambatan yang dihadapi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif analitis, yakni: *“Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.”*¹⁷ Penelitian ini, ingin menggambarkan secara mendalam kebijakan hukum pidana dalam UU BPJS dan penegakan hukumnya di wilayah Kota Surakarta.

3. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Dinas Tenaga Kerja surakarta dan

¹⁶*Ibid*, Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).

¹⁷Ronny Hanitijo Soemitro.1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal.58.

Polresta Surakarta. Adapun jenis data`sekunder dalam penelitian ini terdiri dari yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian perlindungan jaminan sosial terhadap masyarakat Indonesia khususnya tenaga kerja dalam sistem peradilan pidana terpadu, yakni:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945,
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana,
 - 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang berlakunya tidak mengikat. Dalam penulisan ini penulis mempergunakan bahan hukum sekunder berupa literature-literatur tentang hukum pidana, hukum Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial.
 - c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, di antaranya dari kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut dan kemudian dilakukan analisis data.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang benar dan pasti dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah Dinas Tenaga Kerja Surakarta dan Pejabat Kepolisian Kota Surakarta.

5. Metode Analisis Data

Penganalisaan data yang terkumpul, baik dari data primer, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier, dipergunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa adapun pengambilan data.¹⁸ Adapun pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, berangkat

¹⁸Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). Hal. 5. Teknik deskriptif, yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari preposisi-preposisi hukum atau nonhukum dimana dalam hal ini penulis ingin menguraikan tentang suatu kondisi atau posisi dari kebijakan hukum pidana terhadap Undang-undang nomor 24 tahun 2011.

dari peraturan perundang-undangan (UU BPJS) kemudian di lihat pelaksanaanya/penegakan hukumnya di Kota Surakarta.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab yang setiap bab dibagi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II adalah tinjauan pustaka berisikan mengenai tinjauan umum, yakni: tinjauan umum tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penggolongan tindak pidana, tinjauan umum tentang BPJS, tinjauan umum mengenai ketentuan perusahaan yang wajib mendaftarkan BPJS terhadap karyawannya, tinjauan tentang Undang -Undang BPJS, tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana dalam penyelenggaraan BPJS.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan mendeskripsikan kebijakan hukum pidana di dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, penegakan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta serta hambatan-

hambatan penegakan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

BAB IV adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang akan diberikan berkaitan dengan apa yang telah diteliti atau sesuai dengan hasil penelitian.